



## POKOK PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Swakelola  
Pengadaan Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah dan  
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa

Nomor : B-1542/PL.020/E.2.1/04/2024

Nomor : 329/HK.220/H.4/04/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30 – 04 – 2024) antara:

1. **INUGRAHA**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1/Kpts/KU.010/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2024 , selanjutnya disebut " Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. **TEDY DIRHAMSyah**, yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan VI RT 009 RW 002 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan kartu identitas No. 3174031611720003, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebagai penanggung jawab tim pelaksana Nomor :75/KPTS/KB.100/H.4/04/2024, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

### MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kebun induk kelapa genjah dan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber

daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kebun induk kelapa genjah dan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp410.558.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pembangunan kebun induk kelapa genjah dan sebesar Rp47.900.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa, dengan rincian sebagaimana tertuang pada Lampiran SSKK;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - f. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - g. Proposal; dan
  - h. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak; dan
    - 5) membayar pekerjaan sesuai prestasi kerja dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai prestasi kerja dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
    - 2) mendapat fasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara bulanan dan/atau triwulan dan/atau laporan akhir sesuai petunjuk pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak  
PPK Direktorat Perbenihan Perkebunan



Untuk dan atas nama  
Pelaksana Swakelola  
Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Industri dan Penyegar



## II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

### A. Ketentuan Umum

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.3 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.4 **Jasa Konsultasi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.5 **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **K/L/PD**.
- 1.6 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD.
- 1.7 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
- 1.8 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.9 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.

- 1.10 **Pelaksana Swakelola** adalah instansi pemerintah yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II melalui kesepakatan kerja sama pada tahap persiapan Swakelola.
- 1.11 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Tim Persiapan** adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan Swakelola.
- 1.16 **Tim Pelaksana** adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD lain selaku Pelaksana Swakelola.
- 1.17 **Tim Pengawas** adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan pengawasan Swakelola.
- 1.18 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pelaksana Swakelola.
- 1.19 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

1.22 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola.

1.23 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

## **2. Penerapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian.

## **3. Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

## **4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**

4.1 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/atau
- c. melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam penyelenggaraan Swakelola.

4.2 Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.

4.3 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.4 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam penipuan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Korespondensi**

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## **6. Wakil Sah Para Pihak**

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pelaksana Swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

## **7. Perpajakan**

Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam nilai Kontrak.

## **8. Pengalihan**

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

## **B. Pelaksanaan Kontrak**

### **9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

- 9.1. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 9.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

### **10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Pejabat Penandatanganan Kontrak memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## **11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia**

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukkan ke dalam Kontrak untuk dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.

## **12. Personel dan/atau Peralatan**

- 12.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam KAK dan Proposal.
- 12.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 12.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 12.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 12.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
  - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 12.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 12.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.
- 12.8 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

## **13. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak**

- 13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dibantu oleh Tim Pengawas.
- 13.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.

- 13.3 Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 13.4 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 13.5 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi Tim Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Kontrak ini.

#### **14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- 14.1 Kecuali Kontrak diputus lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 9.2.
- 14.2 Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **C. Penyelesaian Kontrak**

#### **15. Serah Terima Pekerjaan**

- 15.1 Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 15.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 15.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pengawas.
- 15.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 15.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 15.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

- 15.7 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Pelaksana Swakelola untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 15.8 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 15.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 15.10 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Pelaksana Swakelola.

## **16. Layanan Tambahan**

Pelaksana Swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## **D. Perubahan Kontrak**

### **17. Adendum Kontrak**

- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 17.2 Adendum Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 17.3 Selain adendum Kontrak yang diatur pada klausul 17.2, adendum Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Pelaksana Swakelola, dan sebagainya.

- 17.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 17.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 17.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 17.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- Perubahan pekerjaan; dan/atau
  - Keadaan Kahar.
- 17.8 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 17.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.
- 17.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menugaskan Tim Pengawas untuk mereviu kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 17.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum Kontrak.

## **18. Keadaan Kahar**

- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
  - Bencana non alam;
  - Bencana sosial;
  - Pemogokan;
  - Kebakaran;
  - Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau



18.9 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

## **E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

### **19. Penghentian Kontrak**

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 18.

### **20. Pemutusan Kontrak**

20.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Pelaksana Swakelola.

20.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pelaksana Swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.

20.3 Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.

20.4 Pemutusan Kontrak Swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pelaksana Swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak Swakelola secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Pejabat Penandatangan Kontrak.

### **21. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**

21.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;
- d. Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; atau

- e. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pelaksana Swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.
- 21.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 21.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola.

## **22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola**

- 22.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 22.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

## **23. Berakhirnya Kontrak**

- 23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 23.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

## **F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola**

### **24. Nilai Kontrak**

Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

### **25. Pembayaran**

25.1 Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau tidak memiliki rekening operasional, pembayaran atas Kontrak dapat dilakukan kepada rekening kerja sama yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25.2 Pembayaran pekerjaan kepada Pelaksana Swakelola sesuai prestasi kerja dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan.

25.3 PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **26. Penangguhan Pembayaran**

26.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

26.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Pelaksana Swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

26.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pelaksana Swakelola.

## **G. Penyelesaian Perselisihan**

### **27. Itikad Baik**

27.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

- 27.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 27.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

## **28. Penyelesaian Perselisihan**

- 28.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola ini secara musyawarah dan damai.
- 28.2 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

## **H. Lain-Lain**

### **29. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**

Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

### **30. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### **31. Kepemilikan Dokumen**

- 32.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 32.2 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

32.3 Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

### III. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

| Klausul dalam SSUK      | No. SSUK | Pengaturan dalam SSKK  |
|-------------------------|----------|--|
| 5. Korespondensi        |          | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :</p> <p>Nama : Direktorat Perbenihan Perkebunan,<br/>Direktorat Jenderal Perkebunan</p> <p>Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian<br/>Gedung C, Jalan Harsono RM Nomor 3<br/>Ragunan, Jakarta Selatan 12550</p> <p>Telepon : (021) 7815681<br/><i>Website</i> : perbenihan.ditjenbun.pertanian.go.id</p> <p>Faksimili : (021) 7815681<br/><i>e-mail</i> : <a href="mailto:benihperkebunan01@gmail.com">benihperkebunan01@gmail.com</a></p> <p>Pelaksana Swakelola:</p> <p>Nama : Balai Pengujian Standar Instrumen<br/>Tanaman Industri dan Penyegar</p> <p>Alamat : Jalan Raya Pakuwon Km.2 Parungkuda<br/>Sukabumi 43357</p> <p>Telepon : (0266) 7070941<br/><i>Website</i> : tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id</p> <p>Faksimili : (0266) 6542087<br/><i>e-mail</i> : <a href="mailto:bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id">bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id</a><br/><a href="mailto:balittri@gmail.com">balittri@gmail.com</a></p> |
| 6. Wakil Sah Para Pihak |          | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Inugraha</p> <p>Untuk Pelaksana Swakelola: Tedy Dirhamsyah</p>  |

| Klausul dalam SSUK   | No. SSUK | Pengaturan dalam SSKK  |
|--|----------|--|
|  |          | Tim Pengawas: Ketua Kelompok Benih Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak  |
| 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                        | 9.1      | Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2024   |
|  | 9.2      | Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024  |
| 10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatanganan Kontrak |          | Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak   |
| 11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia                   | 12.2     | <p>Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajir;</li> <li>2. Benih kelapa genjah;</li> <li>3. Pupuk;</li> <li>4. Herbisida dan pestisida;</li> <li>5. Eksploitasi mesin pompa;</li> <li>6. Instalasi air;</li> <li>7. Knapsack/handsprayer;</li> <li>8. APK;</li> <li>9. Gerobak dorong;</li> <li>10. Prasarana pendukung kebun induk (pondok jaga, pagar, Listrik, papan nama, dll).</li> </ol> |
| 15. Serah Terima Pekerjaan                                   | 15.2     | Serah terima dilakukan pada: 1 November 2024   |
| 16. Layanan Tambahan   |          | <p>Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana Swakelola :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemeliharaan sesuai standar teknis kebun induk kelapa genjah;</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi kelayakan kebun induk;</li> <li>3. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan benih kelapa genjah untuk kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan.</li> </ol>  |

| <b>Klausul dalam SSUK</b>                             | <b>No. SSUK</b> | <b>Pengaturan dalam SSKK</b>  |
|---|-----------------|---|
| <b>22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola</b> | 22.1.a          | Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.                      |
| <b>28. Pembayaran</b>                                 | 22.1.b          | Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.                                    |
|   | 25.2            | Pembayaran pekerjaan kepada Pelaksana Swakelola sesuai prestasi kerja dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan |
|   | 25.5            | PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah pengajuan dari pelaksana swakelola.                     |

**Lampiran Syarat Syarat Khusus Kontrak  
Biaya Kegiatan Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah dan Pemeliharaan  
Kebun Induk Tanaman Kelapa TA 2024**

| Kode MAK      | Uraian   | Rincian Biaya |              |                    |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------------|
|               |  | Volume        | Harga Satuan | Jumlah Biaya       |
| 5890.RAI.001  | Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan  |               |              |                    |
| 052           | Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam  |               |              |                    |
| <b>A</b>      | <b>Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 8 BSIP TRI</b>                            | <b>5 Ha</b>   |              | <b>47.900.000</b>  |
| <b>521211</b> | <b>Belanja Bahan</b>   |               |              | <b>29.300.000</b>  |
|               | - Urea   | 600 kg        | 10.000       | 6.000.000          |
|               | - SP 36  | 450 kg        | 12.500       | 5.625.000          |
|               | - KCL  | 900 kg        | 16.000       | 14.400.000         |
|               | - Kieserit/Dolomit   | 120 kg        | 5.000        | 600.000            |
|               | - Herbisida  | 5 liter       | 200.000      | 1.000.000          |
|               | - Insektisida  | 5 liter       | 335.000      | 1.675.000          |
| <b>524111</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |               |              | <b>10.100.000</b>  |
|               | - Perjalanan Petugas Prov. ke Lokasi   | 4 OT          | 2.125.000    | 8.500.000          |
|               | - Perjalanan Petugas Kab. ke lokasi  | 5 OT          | 320.000      | 1.600.000          |
| <b>526312</b> | <b>Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah</b> |               |              | <b>8.500.000</b>   |
|               | - Insentif Pemeliharaan dan Pemupukan  | 100 hok       | 85.000       | 8.500.000          |
| <b>B</b>      | <b>Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah di Provinsi DKI Jakarta, BSIP TRI</b>             | <b>6 Ha</b>   |              | <b>410.558.000</b> |
| <b>521211</b> | <b>Belanja Bahan</b>   |               |              | <b>162.258.000</b> |
|               | - Ajir   | 1068 Btg      | 1.500        | 1.602.000          |
|               | - Benih unggul siap tanam  | 1068 Btg      | 70.000       | 74.760.000         |
|               | - Herbisida  | 18 Ltr        | 150.000      | 2.700.000          |
|               | - Insektisida  | 6 Ltr         | 336.000      | 2.016.000          |
|               | - Metarhizium  | 60 Kg         | 145.000      | 8.700.000          |
|               | - Pupuk Organik (Pabrikan)   | 6.000 Kg      | 9.000        | 54.000.000         |
|               | - Urea   | 300 Kg        | 11.500       | 3.450.000          |
|               | - SP 36  | 360 Kg        | 13.000       | 4.680.000          |
|               | - KCI  | 300 Kg        | 16.500       | 4.950.000          |
|               | - Kieserite  | 540 Kg        | 10.000       | 5.400.000          |
| <b>521219</b> | <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>  |               |              | <b>5.000.000</b>   |
|               | - Eksploitasi Mesin Pompa Air (2 Mesin x 5 Bulan)  | 10 Bln        | 500.000      | 5.000.000          |
| <b>526312</b> | <b>Balanja Barang untuk Bantuan lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah</b> |               |              | <b>81.600.000</b>  |
|               | - Pembukaan lahan  | 450 HOK       | 85.000       | 38.250.000         |
|               | - Pembuatan jalan dan drainase blok  | 60 HOK        | 85.000       | 5.100.000          |

| Kode MAK      | Uraian  | Rincian Biaya |              |                    |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------------|
|               |   | Volume        | Harga Satuan | Jumlah Biaya       |
|               | - Pengajiran  | 24 HOK        | 85.000       | 2.040.000          |
|               | - Pembuatan lubang tanam  | 60 HOK        | 85.000       | 5.100.000          |
|               | - Penanaman   | 60 HOK        | 85.000       | 5.100.000          |
|               | - Monitoring dan Pengendalian OPT   | 24 HOK        | 85.000       | 2.040.000          |
|               | - Pemupukan (Pembersihan piringan)  | 60 HOK        | 85.000       | 5.100.000          |
|               | - Penyulaman  | 12 HOK        | 85.000       | 1.020.000          |
|               | - Penyiangan  | 30 HOK        | 85.000       | 2.550.000          |
|               | - Penyiraman  | 90 HOK        | 85.000       | 7.650.000          |
|               | - Pemagaran   | 90 HOK        | 85.000       | 7.650.000          |
| <b>532111</b> | <b>Belanja Modal, Peralatan dan Mesin</b>                                       |               |              | <b>53.200.000</b>  |
|               | - Instalasi air   | 2.0 Pkt       | 22.500.000   | 45.000.000         |
|               | - Knapsack/Handsprayer  | 2.0 Unit      | 1.500.000    | 3.000.000          |
|               | - APK   | 2.0 Pkt       | 1.600.000    | 3.200.000          |
|               | - Gerobak Dorong  | 2.0 Pkt       | 1.000.000    | 2.000.000          |
| <b>533111</b> | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>  |               |              | <b>108.500.000</b> |
|               | - Prasarana pendukung kebun induk (pondok jaga, pagar, listrik, papan nama dll) | 1.0 Unit      | 108.500.000  | 108.500.000        |